

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

LAMBANG DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

TAHUN 2011



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

LAMBANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

- Menimbang** : a. bahwa untuk melambangkan kondisi wilayah dan masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat serta untuk kelengkapan administrasi dan kelengkapan atribut pemerintahan perlu adanya Lambang Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Lambang Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat Propinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 Tentang Lambang Daerah (Lembar Negara Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara 4790);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
dan
BUPATI TULANG BAWANG BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LAMBANG DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang bersifat otonom.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom sebagai Badan Eksekutif Daerah di Kabupaten Tulang Bawang Barat.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legeslatif Daerah di Kabupaten Tulang Bawang Barat.
5. Lambang Daerah adalah Lambang berisi tatanan nilai-nilai etika dan hukum yang dihayati, dijunjung tinggi dan dijadikan pedoman serta memotivasi dalam bermasyarakat, dalam bekerja mewujudkan terciptanya kehidupan yang beriman, bertaqwa, tertib, adil makmur dan sejahtera di Kabupaten Tulang Bawang Barat.
6. Pataka/Panji Daerah adalah Pataka/Panji Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
7. Vandel Daerah adalah Vandel Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
8. Masyarakat adalah Masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat.

BAB II

JENIS, BENTUK DAN ARTI LAMBANG DAERAH

Pasal 2

- (1) Lambang Daerah meliputi:
 - a. logo;
 - b. bendera;
 - c. bendera jabatan kepala daerah;
 - d. himne.
- (2) Lambang Daerah berbentuk :
 - a. logo
 - b. bendera;
 - c. panji;
 - d. umbul-umbul;
 - e. lencana dan atau pin;
 - f. sticker;
 - g. vandel, plakat dan atau badge;
 - h. lukisan semen/relief, cat dan ukiran kayu atau kain.

- (3) Gambar Logo Lambang Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah:



Logo Lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai gambar dan arti sebagai berikut :

- a. Logo Lambang Daerah berbentuk Perisai Bersegi Lima, menggambarkan bahwa masyarakat Tulang Bawang Barat sanggup mempertahankan cita-cita Bangsa Indonesia dan melanjutkan pembangunan serta memajukan daerah berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- b. Tulisan Tulang Bawang Barat dengan huruf merah dan dasar putih mempunyai makna bahwa keberadaan dan terbentuknya Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah dalam nuansa persatuan dan kesatuan, semangat kebersamaan serta kehormatan terhadap Sang Saka Merah Putih sebagai Lambang Kedaulatan Republik Indonesia;
- c. Mata Payan di atas payung beserta tangkainya adalah senjata tradisional masyarakat Tulang Bawang Barat yang senantiasa siap mempertahankan daerah dan masyarakatnya;
- d. Payung berwarna putih melambangkan masyarakat Tulang Bawang Barat yang memiliki hati yang suci dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam payung di atas rumbai terdapat 3 (tiga) warna bergaris putih, kuning dan merah dengan pembatas 4 (empat) garis, terdapat 20 (dua puluh) buah rumbai dan berjari-jari 9 (sembilan) buah, menggambarkan bahwa Kabupaten Tulang Bawang Barat di resmikan pada tanggal 3 April 2009;
- e. Siger Lampung berwarna emas merupakan pakaian kebesaran masyarakat adat Lampung melambangkan bahwa masyarakat Tulang Bawang Barat sangat menghormati wanita yang didasari ajaran agama dan adat Lampung;
- f. Rantai bersambung 4 (empat) berwarna putih melambangkan Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan bagian dari 4 (Empat) Marga yang tidak dapat dipisahkan oleh situasi apapun dan masyarakat Tulang Bawang Barat mempunyai kewajiban untuk menjamin keutuhannya sepanjang masa;
- g. Talow adalah instrumen induk dari semua tetabuhan adat, yang dibunyikan pada saat masyarakat adat Tulang Bawang Barat Begawi, mengartikan masyarakat Tulang Bawang Barat berada dalam satu

- × g. Talow adalah instrumen induk dari semua tetabuhan adat, yang dibunyikan pada saat masyarakat adat Tulang Bawang Barat Begawi, mengartikan masyarakat Tulang Bawang Barat berada dalam satu kesatuan walau banyak instrumen yang mengeluarkan bunyi-bunyian, tetapi akan terangkum dalam musyawarah dan mufakat untuk tujuan bersama;
- h. Rangkaian 45 (Empat Puluh Lima) butir padi, 17 (Tujuh Belas) polong kapas dan tali simpul 8 (Delapan) mempunyai makna kebersamaan yang utuh untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera berkemakmuran baik lahir maupun batin, serta makmur berkeadilan dalam wadah Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- i. Pepadun berwarna emas adalah singgasana kerajaan dalam adat Lampung, menunjukkan bahwa masyarakat Tulang Bawang Barat khususnya masyarakat Lampung Pepadun mempunyai cita-cita yang luhur untuk mencapai keberhasilan dalam strata sosial, politik dan ekonomi, khususnya dalam kancah Adat yang selalu digambarkan dalam PIIL PASENGGIRI, BEJULUK BEADEK, NENGAH NYAPPUR, NEMUI NYIMAH dan SAKAI SAMBAYAN;
- j. Tulisan Aksara Lampung yang berbunyi RAGEM SAI MANGI WAWAI;
- k. Seuntai Pita bertuliskan "RAGEM SAI MANGI WAWAI" dasar Putih dengan tulisan berwarna Merah. Ragem Sai Mangi Wawai bermakna "KEBERSAMAAN MENUJU KEBERHASILAN" juga merupakan Motto Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- l. Air dengan 11 (Sebelas) garis menunjukkan Kabupaten Tulang Bawang Barat mempunyai cikal bakal dari 11 (Sebelas) kampung. Pada masa lalu transportasi yang digunakan oleh masyarakat adalah melalui sungai yaitu Way Rarem, Way Tulang Bawang, Way Kiri. Sungai Tulang Bawang mengalir sepanjang tahun dan memberikan sumber kehidupan bagi masyarakat Tulang Bawang Barat, yang nantinya akan berkembang menjadi agrobisnis baik untuk pertanian maupun perikanan.

BAB III

KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Lambang daerah berkedudukan sebagai tanda identitas daerah.
- (2) Lambang daerah berfungsi sebagai pengikat kesatuan sosial budaya masyarakat daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Lambang Daerah bukan merupakan simbol kedaulatan daerah.

BAB IV

HAKEKAT LAMBANG DAERAH

Pasal 5

Lambang Daerah merupakan kristalisasi dari nilai-nilai etika dan hukum yang ada pada masyarakat Tulang Bawang Barat, diyakini kebenarannya dan dapat memberikan motivasi untuk menjaga martabat dari perbuatan tercela.

BAB V

WARNA LOGO LAMBANG DAERAH

Pasal 6

Dalam Logo Lambang Daerah terdapat warna merah, putih, kuning, hijau, hitam dan biru yang bermakna :

- a. merah : keberanian, menumbuhkan perilaku pejuang, melambangkan beragam suku;
- b. putih : kesucian, menumbuhkan perilaku yang jujur dan benar, melambangkan beragam marga;
- x c. kuning : keluhuran dan kemuliaan, menumbuhkan perilaku terhormat dan bermartabat, melambangkan kampung;
- d. hijau : kemakmuran dan kesejahteraan, menumbuhkan perilaku bekerja dan profesional;
- e. hitam : ilmu pengetahuan dan teknologi, menumbuhkan perilaku belajar dan kecerdasan;
- f. biru : kewibawaan, menumbuhkan rasa kewibawaan.

BAB VI

DESAIN LAMBANG DAERAH

Pasal 7

- (1) Desain bendera daerah berbentuk segi empat panjang dengan ukuran panjang dan lebar 3 (tiga) berbanding 2 (dua) yang memuat logo daerah.
- (2) Desain logo daerah disesuaikan dengan isi logo.

Pasal 8

- (1) Desain bendera jabatan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c berbentuk segi empat panjang, yang panjangnya 30 (tiga puluh) sentimeter dan lebarnya 20 (dua puluh) centimeter dan di tengah-tengahnya terdapat gambar lambang negara dengan warna dasar biru.
- (2) Gambar lambang negara pada bendera jabatan Bupati berwarna perak dengan pinggiran berwarna perak.

Pasal 9

- (1) Himne daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d berbentuk puisi atau syair yang isinya mengajak masyarakat untuk membangun daerah, melestarikan budaya, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Puisi atau syair himne daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertentangkan suku, agama, ras dan antar golongan.
- (3) Puisi atau syair himne daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan puisi atau syair himne organisasi terlarang atau organisasi/perkumpulan/lembaga/gerakan separatis.

- (4) Lagu daerah dapat ditetapkan menjadi himne daerah dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (5) Puisi atau syair himne daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa Indonesia.
- (6) Dalam hal puisi atau syair himne daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) menggunakan bahasa daerah, terjemahan dalam bahasa Indonesia disertakan dalam penetapan Peraturan Daerah tentang Himne Daerah.

BAB VII

PENGGUNAAN DAN PENEMPATAN

Pasal 10

- (1) Logo daerah dapat digunakan pada bangunan resmi pemerintahan daerah, gapura, tanda batas antar kabupaten, kop surat, stempel organisasi perangkat daerah, kantor kecamatan atau nama lainnya dan kantor kelurahan/desa atau nama lainnya, serta sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana.
- (2) Logo daerah tidak digunakan pada pertemuan resmi Bupati dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.
- (3) Logo daerah tidak digunakan pada dokumen perjanjian yang akan ditandatangani oleh Bupati dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.

Pasal 11

- (1) Bendera daerah dapat digunakan sebagai pendamping bendera negara pada bangunan resmi pemerintahan daerah, gapura, perbatasan kabupaten serta sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana.
- (2) Bendera daerah yang digunakan sebagai pendamping bendera negara, ukurannya tidak boleh sama atau lebih besar dari bendera negara.
- (3) Bendera daerah dapat digunakan dan ditempatkan dalam pertemuan resmi Bupati dengan mitra kerja/badan/ lembaga dari luar negeri;
- (4) Penggunaan dan penempatan bendera daerah dalam pertemuan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebagai pendamping bendera negara.

Pasal 12

- (1) Bendera jabatan Bupati ditempatkan pada kendaraan dinas/resmi Bupati di luar bagian depan di tengah-tengah.
- (2) Bendera jabatan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan hanya pada upacara hari-hari besar kenegaraan di daerah dan upacara hari ulang tahun daerah.

Pasal 13

- (1) Himne daerah sebagai simbol seni budaya daerah dapat diperdengarkan setelah lagu kebangsaan Indonesia Raya pada upacara hari-hari besar kenegaraan di daerah dan upacara hari ulang tahun daerah.
- (2) Himne daerah tidak diperdengarkan pada pertemuan resmi Bupati dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.

Pasal 14

- (1) Logo daerah yang digunakan pada bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dapat ditempatkan di bagian luar dan/atau di bagian dalam bangunan resmi pemerintahan daerah.
- (2) Penempatan logo daerah di bagian luar bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada papan nama:
 - a. kantor kepala daerah;
 - b. kantor dewan perwakilan rakyat daerah;
 - c. kantor organisasi perangkat daerah, kantor kecamatan atau nama lain dan kantor kelurahan/kampung;
 - d. rumah jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 - e. bangunan sekolah/fasilitas pendidikan milik pemerintah daerah.
- (3) Penempatan logo daerah di bagian luar bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan posisi penempatan lambang negara.
- (4) Penempatan logo daerah di bagian dalam bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
 - a. ruang kerja kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 - b. ruang sidang dewan perwakilan rakyat daerah
 - c. ruang kerja kepala organisasi perangkat daerah, kantor kecamatan atau nama lain dan kantor kelurahan/kampung;
 - d. ruang tamu di rumah jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 - e. ruang kepala sekolah/pimpinan lembaga pendidikan, ruang guru, ruang tata usaha, ruang kelas, ruang pertemuan/aula dan ruang tamu pada bangunan sekolah/fasilitas pendidikan milik pemerintah daerah.
- (5) Penempatan logo daerah di dalam gedung bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan posisi penempatan lambang negara.

Pasal 15

- (1) Logo daerah dapat ditempatkan bersama-sama dengan logo lembaga lain/badan usaha komersial pada ruang terbuka dan/atau ruang tertutup.
- (2) Penempatan logo lembaga lain/badan usaha komersial tidak lebih tinggi dari posisi logo daerah.

Pasal 16

- (1) Logo daerah yang digunakan pada kop surat Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) ditempatkan di bagian paling atas posisi tengah kertas.
- (2) Logo daerah pada stempel Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) digunakan pada surat-surat resmi Organisasi Perangkat Daerah, kantor kecamatan atau nama lainnya, kantor kelurahan/desa atau nama lainnya dan ditempatkan di sebelah kiri tandatangan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah, kecamatan atau nama lainnya, kelurahan/desa atau nama lainnya.

Pasal 17

- (1) Logo daerah yang digunakan sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) ditempatkan pada dada kiri atas atau kerah baju atau topi.
- (2) Penempatan logo daerah sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan penempatan lencana lambang negara.

Pasal 18

- (1) Bendera daerah yang digunakan pada bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat ditempatkan di bagian luar dan/atau di bagian dalam bangunan resmi pemerintahan daerah.
- (2) Penempatan bendera daerah di bagian luar bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada :
 - a. kantor bupati;
 - b. rumah jabatan bupati dan wakil bupati.
- (3) Penempatan bendera daerah di bagian luar bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan bendera negara.
- (4) Penempatan bendera daerah di bagian dalam bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pada:
 - a. ruang tamu dan ruang kerja bupati dan wakil bupati;
 - b. ruang rapat utama pada kantor bupati;
 - c. ruang kerja pimpinan dan ruang sidang dewan perwakilan rakyat daerah;
 - d. ruang tamu di rumah jabatan bupati dan wakil bupati;
 - e. ruang kerja camat atau nama lain dan kepala desa/kampung;
 - f. ruang kepala sekolah/pimpinan lembaga pendidikan pada bangunan sekolah/fasilitas pendidikan milik pemerintah daerah.
- (5) Penempatan bendera daerah di dalam gedung bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan bendera negara.
- (6) Dalam hal bendera daerah ditempatkan berdampingan dengan bendera negara, bendera daerah diposisikan di sebelah kanan.

Pasal 19

Bendera daerah tidak dikibarkan pada upacara memperingati hari-hari besar kenegaraan di daerah, upacara hari ulang tahun daerah, dan/atau upacara/apel bendera lainnya.

Pasal 20

Bendera daerah yang digunakan pada gapura tanda batas kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) ditempatkan lebih tinggi dari bendera atau umbul-umbul badan usaha komersial.

Pasal 21

- (1) Bendera daerah yang digunakan sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) ditempatkan pada dada kiri atas atau kerah baju atau topi.
- (2) Penempatan bendera daerah sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih tinggi atau sejajar dari lencana lambang negara.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Setiap orang atau badan yang sengaja melanggar ketentuan Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17,

Pasal 18 dan Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan, semua Lambang Daerah harus disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dilakukan penyesuaian, maka Lambang Daerah tersebut bukan merupakan Lambang Daerah dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya peraturan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 14 Januari 2011

PENJABAT BUPATI TULANG BAWANG BARAT,



BACHTIAR BASRI

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 20 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH,



SIGIT TRENGGONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
TAHUN 2011 NOMOR 03

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR TAHUN 2011
TENTANG
LAMBANG DAERAH

I. UMUM

Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan pemekaran dari Kabupaten Tulang Bawang, yang terdiri dari 8 (delapan) Kecamatan yaitu Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kecamatan Lambu Kibang, Kecamatan Gunung Terang, Kecamatan Tumijajar, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kecamatan Gunung Agung, Kecamatan Way Kenanga dan Kecamatan Pagar Dewa. Kabupaten Tulang Bawang Barat Mempunyai luas wilayah keseluruhan kurang lebih 1.201 Km², dengan jumlah penduduk 233.360 jiwa pada tahun 2006.

Bedasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat perlu adanya Lambang Daerah. Bahwa Lambang Daerah tersebut untuk melambangkan kondisi wilayah dan kondisi masyarakat serta untuk kelengkapan administrasi dan kelengkapan atribut pemerintahan dan hal tersebut harus dituangkan dalam Peraturan Daerah.

Bahwa dalam melaksanakan tata pergaulan sehari-hari maupun penerapan dalam peraturan perundang-undangan selalu mencerminkan falsafa Pancasila serta nilai-nilai budaya asli masyarakat adat Tulang Bawang Barat maupun masyarakat yang datang kemudian, nilai-nilai tersebut menjadi pendorong, menumbuhkan semangat kepeloporan dan kebersamaan bagi masyarakat dan segenap penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam percepatan pembangunan menuju masyarakat yang beriman, bertaqwa, maju, adil, sejahtera dan tentram.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Bahwa bentuk, ukuran dan penggunaan logo disesuaikan dengan isi logo.

Huruf b

Bahwa bentuk bendera segi empat adalah bentuk bendera pada umumnya dengan perbandingan lebar dan panjang adalah 90 (sembilan puluh) berbanding 60 (enam puluh), terbuat dari kain yang mudah berkibar ketika ditiup angin. Dalam bendera terdapat gambar Lambang Daerah dengan ukuran berbanding 35 (tiga puluh) berbanding 45 (empat puluh lima).

Huruf c

Bahwa lambang daerah berbentuk panji berukuran lebar 75 (tujuh puluh lima) sentimeter dan panjang 120 (seratus dua puluh) sentimeter terbuat dari

kain satin warna hijau serta di kelilingi oleh rumbai berwarna kuning emas dengan paduan warna sebagaimana terdapat pada pasal 2 Peraturan Daerah ini. Panji ini berbentuk segi lima diikat pada tiang setinggi 200 (dua ratus) sentimeter terbuat dari kayu ibul dan disimpan berdiri tegak dalam lemari kaca, diletakkan di ruang kerja Bupati. Panji dimaksud dibuatkan 1 (satu) buah duplikat dan diletakkan pada ruang kerja ketua DPRD. Pada pucuk tiang panji diberi siger dari bahan kuningan dengan lebar 10 (sepuluh) sentimeter dan tinggi 5 (lima) sentimeter. Warna panji terbuat dari benang bordir dengan kualitas tinggi. Pada saat prosesi pelantikan Bupati, Wakil Bupati dan Anggota DPRD maka panji dikeluarkan dan dibawa oleh 3 (tiga) orang anggota Polisi Pamong Praja dengan Posisi panji di tengah memasuki ruang pelantikan 5 (lima) menit setelah Bupati atau Anggota DPRD yang akan dilantik didalam ruang pelantikan. Posisi Petugas pembawa panji berdiri tegak dekat dinding menghadap meja pelantikan.

Huruf d

Bahwa bentuk umbul-umbul segi empat panjang seperti bentuk umbul-umbul pada umumnya dengan berbagai variasi yang terbuat dari kain yang berwarna, yang mudah berkibar saat tertiuip angin. Di dalam pangkal bawah umbul-umbul dapat dibuat Lambang Daerah.

Huruf e

Bahwa bentuk lencana dan atau pin dapat bervariasi dengan gambar Lambang Daerah yang tidak menyimpang, Lambang Daerah dapat tidak berwarna yang dibuat dari berbagai bahan seperti perak, kuningan, kaca bahkan emas. Ukuran lencana dan atau pin dibuat sesuai dengan kebutuhan.

Huruf f

Bahwa bentuk stiker dapat bervariasi dengan gambar Lambang Daerah yang tidak boleh menyimpang, dibuat dari berbagai bahan dan dapat ditempel diberbagai tempat yang layak.

Huruf g

Bahwa bentuk vandel dan atau plakat dapat dibuat bervariasi dengan gambar Lambang Daerah yang tidak boleh menyimpang, dibuat dari berbagai jenis bahan. Lambang Daerah dapat dibuat tidak berwarna. Bentuk badge dibuat dari bahan kain dan pada umumnya dipasang pada baju seragam dengan warna harus sesuai dengan gambar Lambang Daerah.

Huruf h

Bahwa bentuk relief atau lukisan dari semen, cat dan ukiran kayu atau kain dengan gambar Lambang Daerah yang tidak boleh menyimpang dan berwarna. Berbagai bentuk tersebut diatas kecuali panji, dapat diperjual belikan.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Penyimbang-penyimbang Marga pada Kabupaten Tulang Bawang Barat terdiri dari 4 marga yaitu :

1. Marga Tegamoan;
2. Marga Buay Bulan;
3. Marga Suai Umpu;
4. Marga Buay Aji.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

1. Piil Pasenggiri adalah dalam bertutur kata kepada setiap orang harus menjaga sopan santun.
2. Bejuluk Beadek adalah didasarkan kepada "Titie Gamattei" yang diwarisi turun temurun dari zaman dahulu, tata ketentuan pokok yang selalu diikuti (Titie Gamattei) termasuk antara lain menghendaki agar seseorang disamping mempunyai nama juga diberi gelar / sebagai panggilan terhadapnya bagi orang yang belum berkeluarga ia diberi (Bejuluk) dan setelah ia kawin maka akan diberi adek (beadek) setelah melalui Upacara-upacara adat tertentu.
3. Nengah Nyampur adalah sebagai tata pergaulan masyarakat Lampung dengan kesempatan membuka diri / ikut serta dalam pergaulan masyarakat umum dan berpengetahuan luas, ikut serta.
4. Nemui Nyimah adalah untuk mencapai suatu kesepakatan harus berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
5. Sakai Sambayan adalah semua pekerjaan harus saling tolong menolong dan dikerjakan secara gotong royong.

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Yang dimaksud dengan Ragem Sai Mangi Wawai adalah :

1. Ragem Sai adalah kebersamaan seragam, ramai dan meriah, kompak dan bersatu.
2. Mangi Wawai adalah agar menjadi bagus atau menuju hasil yang bagus.

Huruf l

Cikal bakal berdirinya Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah dari 11 Kampung yang terdiri dari Kampung :

- a. Panaragan;
- b. Bandar Dewa;
- c. Menggala Mas;
- d. Pagar Dewa;
- e. Penumangan;
- f. Karta;
- g. Gunung Katun Malay;
- h. Gunung Katun Tanjungan;
- i. Gedung Ratu;
- j. Gunung Terang;
- k. Gunung Agung.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7,

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan dokumen perjanjian pada ketentuan ini meliputi *letter of intent, memorandum of understanding, administrative arrangement, dan plan of operation* atau nama lainnya.

Pasal 11

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Yang dimaksud pertemuan resmi pada ayat ini adalah pertemuan kepala daerah dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri dapat dipasang bendera daerah sebagai pendamping Bendera Negara dan bendera dari daerah/negara bagian/*teritory* sebagai pendamping dari bendera negara yang bersangkutan.

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan acara resmi nasional di daerah antara lain peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, Hari Sumpah Pemuda, dan Hari Pahlawan.

Yang dimaksud dengan acara resmi daerah antara lain misalnya peringatan hari ulang tahun daerah, festival kebudayaan daerah, dan pekan olah raga daerah.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

- Ayat (4)
Cukup jelas
- Ayat (5)
Cukup jelas
- Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Ayat (5)
Cukup jelas
- Ayat (6)
Cukup jelas
- Pasal 19
Yang dimaksud dengan "dikibarkan" pada ketentuan ini adalah dipasang dan dinaikkan pada tiang bendera utama dengan diiringi lagu/himne daerah.
- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 24
Cukup jelas
- Pasal 25
Cukup jelas

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Nomor **03** Tahun 2011

Seri —

Nomor —

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Nomor : **3** TAHUN 2011

TENTANG

LAMBANG DAERAH

Diundangkan dalam lembaran daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat

Nomor **03** Tahun 2011

Seri —

Tanggal **20** Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,


SIGIT TRENGGONO, S.H., M.H.

Pembina Utama Madya

NIP. 19540904 198401 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Diponegoro Nomor 42 Kabupaten Tulang Bawang Barat 34594
Telepon : (0725) 7578116 Faks : (0725) 7578116

Panaragan, 18 Januari 2011

Kepada

Nomor : 188.34/ /I.02/TBB/2011

Yth. Penjabat Bupati Kabupaten
Tulang Bawang Barat

di -
Panaragan

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

- Disampaikan dengan hormat : Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat
- Tentang : Lambang Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- Catatan : Terlampir Konsep Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tentang Lambang Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang telah disahkan oleh Gubernur Lampung.
- Lampiran : 1 (satu) eksemplar
- Untuk Mohon persetujuan dan tanda tangan : Penjabat Bupati kabupaten Tulang Bawang Barat

DISPOSISI PIMPINAN :

1. - Asisten I
- Asisten II
2. Sekda
3. Bupati

**KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN ORGANISASI**


ERSANI, S.H.

Pembina

NIP. 19660427 198603 1 003

Catatan : Coret yang tidak perlu.



GUBERNUR LAMPUNG

Bandar Lampung, 13 Januari 2011

Nomor : 188.342/ 0096 /03/2011
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Evaluasi Raperda tentang
Lambang Daerah

Kepada Yth.
BUPATI TULANG BAWANG
BARAT BARAT

di-
PANARAGAN

Memenuhi maksud surat Saudara Nomor : 188.342/309/I.02/TBB/2010 tanggal 15 Desember 2010 perihal Penyampaian Raperda tentang Lambang Daerah, bersama ini disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Rancangan Peraturan Daerah dimaksud telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah, oleh karenanya Rancangan Peraturan Daerah tersebut dapat diproses lebih lanjut untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
2. Dalam rangka kesempurnaan Raperda tersebut, diminta kepada saudara untuk menyempurnakan / merevisi Raperda tersebut sesuai hasil koreksi terlampir.

Demikian untuk maklum dan menjadi perhatian untuk pelaksanaannya.

PARAF KOORDINASI	
1	WAKIL GUBERNUR
2	SEKDA. PROVINSI
3	ASS. BID. PEM.
4	ASS. BID. EK BANG
5	ASS. BID. KESRA
6	ASS. BID. UMUM
7	
8	
9	
10	BIRO HUKUM

GUBERNUR LAMPUNG,

Drs. SJACHROEDIN Z.P, SH.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
Up. Kepala Biro Hukum Setjen Kemendagri di Jakarta.
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat di Panaragan.

LAMPIRAN : SURAT GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 188.342/ 0096 /03/2011
TANGGAL : 13 JANUARI 2011

**CATATAN, KOREKSI, SARAN DAN REKOMENDASI
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
BARAT TENTANG LAMBANG DAERAH**

1. TATA NASKAH DINAS

- a. Tata cara / teknis penulisan belum berpedoman pada ketentuan yang berlaku .
- b. Masih terdapat kesalahan pengetikan.
- c. Perhatikan teknis penulisan huruf, tanda baca dll

2. MATERI

- a. Judul Raperda semula tentang “LAMBANG DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT” diubah menjadi tentang “LAMBANG DAERAH”.
- b. Nama jabatan yang menetapkan diakhiri dengan tanda baca koma.
- c. Konsideran Menimbang, pada akhir kalimat diberi jarak/spasi.
- d. Dasar hukum Mengingat :
 - 1) Pencantuman dan penulisan peraturan perundang-undangan pada dasar hukum Mengingat harus dilengkapi dengan Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.
 - 2) Tambahkan dasar hukum “Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);”.
- e. Frasa/kalimat “Dengan persetujuan bersama” diubah menjadi “Dengan Persetujuan Bersama”.
- f. Diktum Menetapkan pada judul kata “KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT” dihilangkan.
- g. Batang Tubuh :
 - 1) Pasal 1 Angka 1 kata “Kabupten” diubah menjadi kata “Kabupaten” dan kata “Kepala Daerah” diubah menjadi kata “Bupati” serta setiap akhir kalimat diakhiri dengan tanda baca titik, yang lain menyesuaikan.
 - 2) Pasal 2 :
 - Ayat (1) huruf a, b, c, d dan (2) huruf a, b, c, d, e, f, g, h penulisan awal kalimat menggunakan huruf kecil.
 - Ayat (3) kata “terdapat dalam ayat 1” diubah menjadi kata “dimaksud pada ayat (1)” dan pada setiap akhir kalimat diberi jarak/spasi.
 - 3) Pasal 6 :
 - Penjelasan warna logo hanya mencantumkan warna a. Merah, b. Putih, c. Kuning, d. Hijau dan e. Dalam logo lambang daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (3) terdapat warna *biru* yang terletak dibawah gambar talow, yang tidak/belum ada penjelasan makna warna biru.
 - huruf c kata “menmumbuhkan” diubah menjadi kata “menumbuhkan”.
 - huruf e kata “tehknologi” diubah menjadi kata “teknologi” dan kata “keceedasan” diubah menjadi kata “kecerdasan”.

- 4) Pasal 7 :
- Ayat (3) kata "Pasal 1" diubah menjadi kata "Pasal 2 ayat (1) huruf c".
 - Ayat (5) kata "Pasal 1" diubah menjadi kata "Pasal 2 ayat (1) huruf d".
 - Ayat (3) dan (4) menjadi pasal tersendiri yaitu Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2).
 - Pasal 7 ayat (5) dihapus
- 5) Tambahkan pasal baru yaitu Pasal 9, ambil dari Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007, pasal lain menyesuaikan.
- 6) Pasal 20 Ketentuan Pidana, agar dipertimbangkan kembali apakah sanksi pidana benar-benar akan diterapkan apabila orang atau badan tidak melaksanakan/mematuhi ketentuan pasal-pasal sebagaimana tersebut dalam Pasal 20.
- 7) Pasal 21 ayat (1) kata "sesuai" diubah menjadi kata "d disesuaikan" dan setelah kata "ketentuan" tambahkan kata "yang ditetapkan".
- 8) Pasal 22 setelah kata "Peraturan" tambahkan kata "Daerah".
- 9) Pasal 23 kata "Agar....." diturunkan, disejajarkan dengan kalimat "Peraturan Daerah....".
- 10) Pada penetapan dan pengundangan, nama jabatan diakhiri dengan tanda baca koma dan nama pejabat tanpa gelar, pangkat dan NIP serta kata "Desember 2010" dihilangkan.
- 11) Perhatikan pengutipan pasal dan ayat sebelumnya.
- 12) Kalimat "Organisasi Perangkat Daerah" yang ada pada beberapa pasal diubah menjadi "Satuan Kerja Perangkat Daerah"
- 13) Pada Penjelasan :
- a) Umum kata "Kecmatan" menjadi kata "Kecamatan" setelah kata "Gunung Terang" dan kata "Gunung Agung" diakhiri dengan tanda baca koma, serta kata "falsafa" diubah menjadi kata "falsafah".
 - b) Pasal Demi Pasal ayat (3) huruf i angka 3 kata "Nyampur" diubah menjadi kata "Nyampur" dan "Pasal 16 cukup jelas" dihilangkan.

PARAF KOORDINASI	
1	WAKIL GUBERNUR
2	SEKDA. PROVINSI
3	ASS. BID. PEM.
4	ASS. BID. EK BANG
5	ASS. BID. KESRA
6	ASS. BID. UMUM
7	
8	
9	
10	BIRO HUKUM

GUBERNUR LAMPUNG,

Drs. SJACHROEDIN Z.P, SH.

4) Pasal 7 :

- Ayat (3) kata "Pasal 1" diubah menjadi kata "Pasal 2 ayat (1) huruf c".
- Ayat (5) kata "Pasal 1" diubah menjadi kata "Pasal 2 ayat (1) huruf d".
- Ayat (3) dan (4) menjadi pasal tersendiri yaitu Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2).
- Pasal 7 ayat (5) dihapus

5) Tambahkan pasal baru yaitu Pasal 9, ambil dari Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007, pasal lain menyesuaikan.

6) Pasal 20 Ketentuan Pidana, agar dipertimbangkan kembali apakah sanksi pidana benar-benar akan diterapkan apabila orang atau badan tidak melaksanakan/mematuhi ketentuan pasal-pasal sebagaimana tersebut dalam Pasal 20.

7) Pasal 21 ayat (1) kata "sesuai" diubah menjadi kata "disesuaikan" dan setelah kata "ketentuan" tambahkan kata "yang ditetapkan".

8) Pasal 22 setelah kata "Peraturan" tambahkan kata "Daerah".

9) Pasal 23 kata "Agar....." diturunkan, disejajarkan dengan kalimat "Peraturan Daerah...".

10) Pada penetapan dan pengundangan, nama jabatan diakhiri dengan tanda baca koma dan nama pejabat tanpa gelar, pangkat dan NIP serta kata "Desember 2010" dihilangkan.

11) Perhatikan pengutipan pasal dan ayat sebelumnya.

12) Kalimat "Organisasi Perangkat Daerah" yang ada pada beberapa pasal diubah menjadi "Satuan Kerja Perangkat Daerah"

13) Pada Penjelasan :

- a) Umum kata "Kecmatan" menjadi kata "Kecamatan" setelah kata "Gunung Terang" dan kata "Gunung Agung" diakhiri dengan tanda baca koma, serta kata "falsafa" diubah menjadi kata "falsafah".
- b) Pasal Demi Pasal ayat (3) huruf i angka 3 kata "Nyampur" diubah menjadi kata "Nyamppur" dan "Pasal 16 cukup jelas" dihilangkan.

GUBERNUR LAMPUNG,

Drs. SJACHROEDIN Z.P, SH.

4) Pasal 7 :

- Ayat (3) kata "Pasal 1" diubah menjadi kata "Pasal 2 ayat (1) huruf c".
- Ayat (5) kata "Pasal 1" diubah menjadi kata "Pasal 2 ayat (1) huruf d".
- Ayat (3) dan (4) menjadi pasal tersendiri yaitu Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2).
- Pasal 7 ayat (5) dihapus

5) Tambahkan pasal baru yaitu Pasal 9, ambil dari Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007, pasal lain menyesuaikan.

6) Pasal 20 Ketentuan Pidana, agar dipertimbangkan kembali apakah sanksi pidana benar-benar akan diterapkan apabila orang atau badan tidak melaksanakan/mematuhi ketentuan pasal-pasal sebagaimana tersebut dalam Pasal 20.

7) Pasal 21 ayat (1) kata "sesuai" diubah menjadi kata "disesuaikan" dan setelah kata "ketentuan" tambahkan kata "yang ditetapkan".

8) Pasal 22 setelah kata "Peraturan" tambahkan kata "Daerah".

9) Pasal 23 kata "Agar....." diturunkan, disejajarkan dengan kalimat "Peraturan Daerah....".

10) Pada penetapan dan pengundangan, nama jabatan diakhiri dengan tanda baca koma dan nama pejabat tanpa gelar, pangkat dan NIP serta kata "Desember 2010" dihilangkan.

11) Perhatikan pengutipan pasal dan ayat sebelumnya.

12) Kalimat "Organisasi Perangkat Daerah" yang ada pada beberapa pasal diubah menjadi "Satuan Kerja Perangkat Daerah"

13) Pada Penjelasan :

- a) Umum kata "Kecmatan" menjadi kata "Kecamatan" setelah kata "Gunung Terang" dan kata "Gunung Agung" diakhiri dengan tanda baca koma, serta kata "falsafa" diubah menjadi kata "falsafah".
- b) Pasal Demi Pasal ayat (3) huruf i angka 3 kata "Nyampur" diubah menjadi kata "Nyamppur" dan "Pasal 16 cukup jelas" dihilangkan.

GUBERNUR LAMPUNG,

Drs. SJACHROEDIN Z.P, SH.

- 4) Pasal 7 :
 - Ayat (3) kata "Pasal 1" diubah menjadi kata "Pasal 2 ayat (1) huruf c".
 - Ayat (5) kata "Pasal 1" diubah menjadi kata "Pasal 2 ayat (1) huruf d".
 - Ayat (3) dan (4) menjadi pasal tersendiri yaitu Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2).
 - Pasal 7 ayat (5) dihapus
- 5) Tambahkan pasal baru yaitu Pasal 9, ambil dari Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007, pasal lain menyesuaikan.
- 6) Pasal 20 Ketentuan Pidana, agar dipertimbangkan kembali apakah sanksi pidana benar-benar akan diterapkan apabila orang atau badan tidak melaksanakan/mematuhi ketentuan pasal-pasal sebagaimana tersebut dalam Pasal 20.
- 7) Pasal 21 ayat (1) kata "sesuai" diubah menjadi kata "disesuaikan" dan setelah kata "ketentuan" tambahkan kata "yang ditetapkan".
- 8) Pasal 22 setelah kata "Peraturan" tambahkan kata "Daerah".
- 9) Pasal 23 kata "Agar....." diturunkan, disejajarkan dengan kalimat "Peraturan Daerah....".
- 10) Pada penetapan dan pengundangan, nama jabatan diakhiri dengan tanda baca koma dan nama pejabat tanpa gelar, pangkat dan NIP serta kata "Desember 2010" dihilangkan.
- 11) Perhatikan pengutipan pasal dan ayat sebelumnya.
- 12) Kalimat "Organisasi Perangkat Daerah" yang ada pada beberapa pasal diubah menjadi "Satuan Kerja Perangkat Daerah"
- 13) Pada Penjelasan :
 - a) Umum kata "Kecamatan" menjadi kata "Kecamatan" setelah kata "Gunung Terang" dan kata "Gunung Agung" diakhiri dengan tanda baca koma, serta kata "falsafa" diubah menjadi kata "falsafah".
 - b) Pasal Demi Pasal ayat (3) huruf i angka 3 kata "Nyampur" diubah menjadi kata "Nyamppur" dan "Pasal 16 cukup jelas" dihilangkan.

GUBERNUR LAMPUNG,

Drs. SJACHROEDIN Z.P, SH.